

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Siklus penggajian merupakan salah satu siklus penting dari sebuah sistem terstruktur yang mengatur di dalam suatu sistem organisasi termasuk pemerintahan. Menurut Romney & Steinbart (2018) siklus penggajian adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data yang berulang terkait dengan pengelolaan tenaga kerja karyawan secara efektif. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Untuk meningkatkan produktivitas dan menjamin kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, dengan jaminan kesejahteraan meliputi gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, dan pensiun serta hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam siklus penggajian, sering timbul tantangan yang menghambat proses penggajian itu sendiri. Salah satu tantangan tersebut menurut Romney & Steinbart (2018) adalah data master tidak akurat atau tidak valid. Berdasarkan Standar

Operasional Prosedur Pembayaran (SOP) gaji induk 2021 Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA bila dibandingkan dengan Standar Operasional Pembayaran (SOP) gaji 2018 Pengadilan Negeri Tais Kelas II sistem administrasi penggajian Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA masih belum terkomputerisasi secara penuh dan tercampur dengan metode konvensional sehingga sangat rentan dalam terjadinya kesalahan pengelolaan data sistem penggajian.

Sistem Informasi Akuntansi penting untuk menyediakan informasi yang akurat dengan ketepatan waktu maksimal sehingga suatu instansi mampu menjalankan aktivitas utama pada rantai nilai dengan efektif dan efisien. Menurut Romney & Steinbart (2018) tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah untuk menyajikan informasi akuntansi bagi pembuat keputusan, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Secara umum, penggajian merupakan suatu siklus yang sangat berisiko untuk timbulnya suatu kesalahan perhitungan data master sampai pelanggaran integritas seperti kecurangan dalam perhitungan gaji. Salah satu cara untuk mengurangi ancaman dari data master yang tidak akurat atau tidak valid adalah dengan menggunakan berbagai kontrol integritas pemrosesan untuk meminimalkan risiko kesalahan input data, maka diperlukan suatu sistem penggajian terkomputerisasi yang mutakhir serta pengendalian internal yang andal sehingga tercipta pelaksanaan siklus penggajian yang akuntabel dan terpercaya dalam siklus penggajian Pengadilan Negeri Cibinong.

Menurut penelitian Ghassani (2019) dijelaskan terdapat beberapa kelemahan dalam siklus penggajian. Pencatatan waktu hadir pada kantor diawasi oleh pihak kepegawaian, tidak ada bagian pencatatan waktu hadir tersendiri. Selain itu

disebutkan lagi di dalamnya jika bagian atau Petugas Pengelolaan Belanja Pegawai membuat kesalahan dengan kurang teliti dalam memasukkan daftar gaji induk, pengeluaran kas gaji menjadi tidak stabil dan gaji yang diberikan kepada kas gaji menjadi tidak stabil dan gaji yang diberikan kepada pegawai berkurang. Menurut penelitian Wahyuni (2018) dijelaskan terdapat beberapa fungsi yang mengalami kendala sehingga terjadi proses yang tidak akurat pada data siklus penggajian. Salah satu fungsi yang dapat dibantu adalah fungsi personalia yang mengelola keseluruhan data karyawan dapat dibantu dengan pembentukan fungsi pencatatan waktu, sehingga pencatatan kehadiran karyawan dapat lebih akurat. Selain itu disebutkan lagi di dalamnya, dokumen pendukung perubahan gaji dan upah masih belum sempurna karena hanya menggunakan rekap absensi karyawan untuk kepentingan pembuatan daftar gaji dan upah yang kemudian diserahkan kepada fungsi pembuat daftar gaji.

Penelitian yang terkait dengan siklus penggajian pada pemerintahan lebih banyak mengkaji instansi dengan karakteristik umum. Siklus penggajian pada pengadilan negeri lebih kompleks karena ada perbedaan dasar hukum antara penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penggajian Hakim, sehingga penulis tertarik untuk melakukan tinjauan penerapan dalam sistem informasi akuntansi khususnya siklus penggajian yang dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul “TINJAUAN ATAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SIKLUS PENGGAJIAN PADA PENGADILAN NEGERI CIBINONG”. Karya tulis ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pelaksanaan sistem informasi akuntansi pada

siklus penggajian sehingga tercipta lingkungan Pengadilan Negeri Cibinong dan tersedia pos bantuan hukum yang akuntabel dan efisien.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Untuk menjawab permasalahan yang mungkin terjadi dalam siklus penggajian pada Pengadilan Negeri Cibinong, maka dirumuskan beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana penerapan standar operasional prosedur pembayaran gaji induk sudah dijalankan di Pengadilan Negeri Cibinong?
2. Bagaimana Pengendalian Internal sudah mendukung penerapan standar operasional prosedur pembayaran gaji induk di Pengadilan Negeri Cibinong?
3. Bagaimana perlengkapan menunjang penerapan standar operasional prosedur pembayaran gaji induk di Pengadilan Negeri Cibinong?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penulis dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini diuraikan seperti berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan standar operasional prosedur pembayaran gaji induk di Pengadilan Negeri Cibinong.
2. Untuk meninjau pengendalian internal pada standar operasional prosedur pembayaran gaji induk di Pengadilan Negeri Cibinong.
3. Untuk meninjau perlengkapan pada standar operasional prosedur pembayaran gaji induk di Pengadilan Negeri Cibinong.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini, penulis membatasi ruang lingkup penulisannya yaitu melakukan tinjauan atas sistem informasi akuntansi hanya pada siklus penggajian menurut standar operasional penggajian yang berlaku di Pengadilan Negeri Cibinong pada tahun 2021 dan menurut sistem informasi akuntansi yang digunakan pada tahun tersebut dimulai dari fungsi setiap aktivitas prosedur dalam siklus penggajian, dokumen yang diperlukan, dan pengendalian internal siklus penggajian di Pengadilan Negeri Cibinong.

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

Penulis berharap penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) mengenai Tinjauan Atas Sistem Informasi Akuntansi Siklus Penggajian pada Pengadilan Negeri Cibinong dapat memberikan manfaat dan wawasan yang bermakna baik dalam penggunaan teoritis dan manfaat praktis, antara lain :

##### **1. Manfaat Teoritis.**

Penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan bisa memberi manfaat baik di dunia kerja agar bisa mengetahui sistem informasi akuntansi khususnya untuk siklus penggajian.

##### **2. Manfaat Praktis.**

###### **a. Bagi Pengadilan Negeri Cibinong**

Penulis berharap dari penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Pengadilan Negeri Cibinong dalam pelaksanaan sistem informasi akuntansi siklus penggajian sehingga dapat menciptakan lingkungan Pengadilan Negeri Cibinong yang mampu

menyediakan Pos Bantuan Hukum yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang akuntabel dan efisien.

b. Bagi Penulis.

Diharapkan penyusunan karya tulis ini menjadi sarana bagi penulis untuk menerapkan teori-teori yang sudah dipelajari selama duduk di bangku perkuliahan.

c. Bagi Pembaca Umum

Penulis berharap karya tulis ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait sistem informasi akuntansi kaitannya dengan siklus penggajian di lingkungan pengadilan negeri.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mencakup gambaran umum penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA). Penulis membaginya menjadi beberapa bagian subbab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan KTTA.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini akan menjelaskan dan menguraikan teori serta peraturan yang masih berlaku dan digunakan sebagai landasan dalam membahas topik yang diambil penulis. Landasan teori ini meliputi penjelasan sistem informasi akuntansi siklus penggajian, fungsi setiap aktivitas prosedur dalam siklus penggajian, dokumen

yang digunakan, serta pengendalian internal siklus penggajian di Pengadilan Negeri Cibinong.

### BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini dibagi menjadi tiga subbab. Subbab pertama, metode pengumpulan data. Pada bagian ini penulis menguraikan beberapa metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data mengenai topik yang akan dibahas penulis. Subbab kedua, gambaran umum dari objek penulisan. Pada subbab ini dijelaskan gambaran umum dari objek penyusunan karya tulis yaitu Pengadilan Negeri Cibinong. Penulis akan memaparkan mengenai gambaran umum, visi dan misi, struktur organisasi, serta uraian dari tugas pokok dan fungsi setiap jabatan yang ada di Pengadilan Negeri Cibinong. Selain itu, penulis akan menjelaskan penerapan dari sistem informasi akuntansi siklus penggajian yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Cibinong, meliputi fungsi setiap aktivitas prosedur dalam siklus penggajian, dokumen yang digunakan, serta pengendalian internal siklus penggajian di Pengadilan Negeri Cibinong. Ketiga, pembahasan dari hasil pengolahan data. Pada bagian ini penulis akan meninjau dan membandingkan antara pelaksanaan sistem informasi akuntansi siklus penggajian di Pengadilan Negeri Cibinong dengan landasan teori yang sudah diuraikan pada BAB II Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini.

### BAB IV SIMPULAN

Bab ini akan berisi kesimpulan dari tinjauan yang telah penulis uraikan pada BAB III yakni berupa baik atau kurangnya penerapan sistem informasi akuntansi siklus penggajian di Pengadilan Negeri Cibinong. Penulis juga akan memberikan saran

atau masukan (jika diperlukan) yang dapat dijadikan referensi guna pelaksanaan sistem informasi akuntansi siklus penggajian yang lebih baik untuk ke depannya.